

ABSTRAK

Ishlah Farid: 210211050112. *Analisis Proses Penyelesaian Gugatan Rekonvensi Harta Bersama dalam Gugatan Konvensi Perceraian di Pengadilan Agama dalam Perspektif Tujuan Hukum dan Mashlahah*, Dr. H. A. Sukris Sarmadi, M.H. dan Dr. H. Nuril Khasyi'in, Lc., M.A., pada Program Studi Magister Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin. (2024).

Kata Kunci: *Gugatan Harta Bersama dan Perceraian, Tujuan Hukum, Mashlahah.*

Pasangan suami-istri dalam sebuah rumah tangga pada umumnya menghasilkan harta bersama. Apabila suami-istri sudah tidak sejalan, mereka seringkali memilih perceraian sebagai solusi. Ketentuan hukum membolehkan perceraian diajukan bersamaan dengan pembagian harta bersama, baik oleh Penggugat (disebut konvensi) maupun melalui gugatan balik oleh Tergugat (disebut rekonvensi). Penggabungan dua gugatan, secara umum, dianggap membuat proses pengadilan menjadi sederhana, cepat dan karenanya berbiaya ringan. Pertanyaannya adalah apakah pengajuan perceraian dan pembagian harta secara bersamaan memang akan menyederhanakan dan mempercepat proses di pengadilan?

Tesis ini mempelajari problematika penyelesaian gugatan rekonvensi harta bersama dalam gugatan konvensi perceraian di pengadilan agama. Tesis ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan hukum doktrinal. Penulis meneliti empat dokumen perkara pengadilan dari berbagai wilayah, yaitu Pengadilan Agama Sibuhuan, Pengadilan Agama Banjarbaru, Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dan Pengadilan Agama Batulicin. Penulis juga mempelajari pendapat para ahli hukum. Data-data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan teori tujuan hukum Gustav Radbruch dan teori mashlahah versi al-Ghazali dan at-Tufi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akibat penggabungan dua gugatan tersebut di atas, proses di pengadilan memakan waktu yang lama. Hal ini karena kasus pembagian harta bersama itu lebih rumit dan memicu perdebatan di antara pihak-pihak. Sebagai akibat buruknya, pasangan yang ingin bercerai ini lambat pula dinyatakan resmi bercerai oleh pengadilan. Lebih lanjut, berlarut-larutnya proses di pengadilan ini akan memunculkan peristiwa hukum lainnya yang serius. Para pihak yang berperkara ini bisa saja menikah lagi di bawah tangan (sirri) dengan orang lain. Pernikahan masing-masing pihak dengan orang baru ini akan membuat mereka, di mata hukum, berpoligami atau dalam kasus si perempuan, berpoliandri. Tentu saja Islam melarang poliandri. Hal ini karena pihak-pihak yang berperkara belum dinyatakan bercerai oleh pengadilan.

Dipandang dari segi teori tujuan hukum Gustav Radbruch, penggabungan dua gugatan seperti di atas menghasilkan keadilan hukum serta kemanfaatan hukum untuk para pihak. Selain cukup membayar satu perkara gugatan saja, para pihak juga bisa langsung mendapatkan hak pembagian harta bersama tersebut. Penggabungan dua gugatan ini penulis anggap sesuai dengan tujuan hukum. Namun apabila dikaji dalam konsep *mashlahah mursalah* al-Ghazali, penggabungan ini akan menimbulkan kemafsadatan. Begitu pula jika konsep

mashlahah at-Tufi untuk menganalisisnya: penggabungan ini memicu kemadhorotan. Oleh karena menghindarkan kemafsadatan dan kemadhorotan adalah tindakan kemaslahatan, proses penggabungan dua gugatan seperti di atas sebaiknya tidak dilakukan.

ABSTRACT

Ishlah Farid: 210211050112. “*Analysis of the Process of Resolving Joint Property Counterclaims in Conventional Divorce Lawsuits in Religious Courts from the Perspective of Legal Objectives and Mashlahah*”, Dr. H. A. Sukris Sarmadi, M.H. dan Dr. H. Nuril Khasyi’in, Lc., M.A., in the Master of Family Law Study Program at UIN Antasari Banjarmasin. (2024).

Key Word: *Joint Property and Divorce Lawsuit, Legal Objectives, Mashlahah.*

Married couples in a household generally produce a common treasure. When a husband and wife are incompatible, they often choose a divorce as the solution. The provision of the law allows a divorce to be filed in conjunction with the sharing of the property, either by the plaintiff (called the convention) or by the plaintiff (reconvention). Combining two applications is, in general, supposed to make the proceedings simple, swift and thus lightly expensive. The question is, would the filing of a divorce and the sharing of property at the same time simplify and speed up the judicial process?

It studies the developmental challenge of resolving a jointly treasure reconvention suit in a divorce court suit. This thesis is a normative-law study with a doctrinal law approach. The writer examined four court matters from various regions, the sibuhuan religious court, the new flood trial, the trial of sidenreng rappang and the trial of. The writer also studied the opinions of jurists. The data collected is then analyzed with the theory of legal purposes of gustav radbruch and mashlahah versions of al-ghazali and at-tufi.

The results of this study indicate that the merging of the two above-mentioned applications resulted in lengthy judicial proceedings. This was because the case of partition of mutual property was more complicated and ignited arguments between parties. As a bad result, the couple seeking a divorce were slow to find themselves legally divorced by the court. Further, the protracted proceedings in this court would result in another serious legal event. The parties of the litigator could remarry under a hand (sirri) with someone else. Each marriage party with this new person would make them, in the eyes of the law, polygamous or in the case of the woman, polygamous. Of course Islam forbids poliandri. This is because the accused had not yet been declared divorced by the court.

Viewed in terms of the theory of the objective of the law of gustav radbruch, a union of two such lawsuits as above resulted in legal justice as well as judicial expecacy for the parties. In addition to paying only one claim, the parties could have the right to disbursement of the common property. The merger of these two plaintiffs is considered fit for legal purposes. But when examined in the concept of mashlahah mursalah al-ghazali, this union will result in martyrdom. So, too, if the concept of mashlahah at-tufi to analyze it: this merger triggers kemadhorowitz. Since excluding martyrdom and death is an act of ingratitude, the process of merging two such claims should not be carried out.